

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20 );
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin sesuatu Satuan Organisasi Negara.
10. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.
12. Staf adalah seluruh pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.

### BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik dan tugas pembantuan serta tugas lain dibidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang politik dan kewaspadaan nasional;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset di lingkungan Kantor; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Struktur Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional; dan
  - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Kepala Kantor

#### Pasal 5

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Kantor serta melaksanakan kebijakan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Kantor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. penetapan program dan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengevaluasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh Bupati.

#### Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler, organisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

##### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis keuangan di lingkungan Kantor;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Kantor;
- f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sub Bagian;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sub Bagian;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyelarasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Kantor;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Sub Bagian Tata Usaha;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kantor; dan

- k. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kelima  
Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. penetapan kebijakan operasional yang berpedoman pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dalam hal bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 11

- (1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis diseksi Politik dan Kewaspadaan Nasional serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- b. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional yang berpedoman pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dalam hal koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Bupati;
- e. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Bupati;
- f. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dikecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dalam hal koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- i. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- j. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional yang berpedoman pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen Keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- k. pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Bupati; dan
- l. pelaksanaan tugas lain dibidang politik dan kewaspadaan nasional yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama,  
Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 13

- (1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- b. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional yang berpedoman pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dalam hal koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional yang berpedoman pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian;
- h. pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian;
- i. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dalam hal koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian;
- j. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter perilaku masyarakat kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian;
- k. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan



lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi perekonomian; dan

1. pelaksanaan tugas lain dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian tugas untuk tiap jabatan struktural ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV TATA KERJA DAN LAPORAN

#### Bagian Kesatu Tata Kerja

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Kantor dan seluruh pejabat struktural dilingkungan Kantor wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-

masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Laporan

### Pasal 17

- (1) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan kantor wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi kantor yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Kantor yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Kantor, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab dibidang kelembagaan memberikan

arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Landak, melaksanakan tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 15 Juni 2012

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 15 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 NOMOR 342